

**RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (RLPPD)  
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA  
TAHUN 2024**

**1. CAPAIAN KINERJA MAKRO**

Capaian kinerja makro merupakan capaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara umum. Capaian kinerja makro dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional. Berikut ini Capaian Kinerja Makro Kabupaten Hulu Sungai Utara :

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024	Laju Kinerja
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,12	71,74	0,62
2	Angka Kemiskinan	6,25	5,75	-0,50
3	Angka Pengangguran	3,85	3,73	-0,12
4	Pertumbuhan Ekonomi	4,51	4,43	-0,08
5	Pendapatan per Kapita	26.132,00	27.887,43	1.755,43
6	Ketimpangan Pendapatan	0,271	0,271	0

Sumber data : *BPS Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2025*

## 2. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Capaian kinerja urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan wajib berkaitan pelayanan dasar, termasuk di antaranya :

### 1. Urusan Pendidikan

#### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan pendidikan yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang Berpartisipasi Dalam PAUD	86,38%	80,38 %
2	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-12 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Dasar	86,56 %	93,73 %
3	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 13-15 Tahun yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Menengah Pertama	89,28 %	100 %
4	Tingkat Partisipasi Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang Belum Menyelesaikan Pendidikan Dasar dan Menengah yang Berpartisipasi Dalam Pendidikan Kesetaraan	72,61 %	97,48 %

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pendidikan

Realisasi belanja Urusan Pendidikan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 322.664.605.998 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Pendidikan; dan
3. Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pendidikan di Kabupaten

Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Bencana Alam ( seperti banjir, angin puting beliung, tanah longsor, pohon tumbang dll) berdampak sangat besar bagi pendidikan dasar, pendidikan kesetaraan dan pendidikan anak usia dini. Seluruh satuan pendidikan tidak melakukan pembelajaran secara tatap muka dan diganti dengan pembelajaran dalam jaringan dan luar jaringan;
2. Program dan kegiatan yang telah direncanakan dan ditetapkan tidak dapat dilaksanakan karena adanya refocusing dan realokasi anggaran; dan
3. Rendahnya realisasi Pendidikan Kesetaraan karena target usia hanya 7-18 tahun yang masuk dalam data perhitungan, sementara banyak penduduk usia lebih dari 18 tahun yang mengikuti pendidikan kesetaraan sehingga tidak termasuk dalam perhitungan.

## 2. Urusan Kesehatan

### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan kesehatan yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Rujukan	1,14 %	1,23 %
2	Persentase RS Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota yang Terakreditasi	100 %	100 %
3	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	82,48 %	78,72 %
4	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan	99,41 %	85,90 %
5	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	97,44 %	84,29 %
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita Sesuai Standar	89,11 %	92,12 %
7	Persentase Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	98,17 %	99,50 %

8	Persentase Orang Usia 15-59 Tahun Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	47,69 %	67,54 %
9	Persentase Warga Negara Usia 60 Tahun Ke Atas Mendapatkan Skrining Kesehatan Sesuai Standar	72,73 %	85,09 %
10	Persentase Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	30,63 %	99,69 %
11	Persentase Penderita Diabetes Melitus (Dm) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	93,9 %	112,60 %
12	Persentase ODGJ Berat yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Jiwa Sesuai Standar	96,7 %	102,97 %
13	Persentase Orang Terduga TBC Mendapatkan Pelayanan TBC Sesuai Standar	65,24 %	114,36 %
14	Persentase Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV Mendapatkan Pelayanan Deteksi Dini Hiv Sesuai Standar	79,77 %	107,46 %

#### B. Realisasi Belanja Urusan Kesehatan

Realisasi belanja Urusan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 142.870.144.733 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
4. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman; dan
5. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Kesehatan di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Capaian SPM Pelayanan kesehatan usia produktif Tahun 2024 sebesar 67,55%, hal ini disebabkan:
  - a. Usia Produktif adalah usia 15-59 tahun, Usia ini adalah anak sekolah dan rata-rata pekerja, sehingga ketika biasanya kader/petugas kesehatan mendata dan melakukan skrining, dengan cara sweeping langsung dan membuka posbindu di desa mereka; dan
  - b. Adanya anggapan bahwa pemeriksaan kesehatan hanya dilakukan jika sakit.
2. Capaian SPM untuk Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil belum mencapai target (78,73%), disebabkan karena:
  - a. Kasus abourtus tinggi, yaitu sebanyak 113 kasus;
  - b. Terlambat K1 Murni sebanyak 30 orang; dan
  - c. Tingginya angka peserta KB aktif yaitu 75,5% sehingga menekan jumlah Ibu Hamil.

### 3. Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

#### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan pekerjaan umum dan penataan ruang yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Rasio Luas Kawasan Pemukiman Rawan Banjir yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota	25,72 %	27,08 %
2	Rasio Luas Kawasan Permukiman Sepanjang Pantai Rawan Abrasi, Erosi, Dan Akresi yang Terlindungi Oleh Infrastruktur Pengaman Pantai di Ws Kewenangan Kabupaten/Kota	0 %	0 %
3	Rasio Luas Daerah Irigasi Kewenangan Kabupaten/Kota yang Dilayani Oleh Jaringan Irigasi	59,87 %	59,87 %

4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga di Seluruh Kabupaten/Kota	91,94 %	92,45 %
5	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	93,41 %	94,24 %
6	Mengukur Rasio Kepatuhan IMB Kabupaten/Kota	12,50 %	37,14 %
7	Tingkat Kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	63,50 %	56,34 %
8.1	Rasio Tenaga Operator / Teknisi / Analisis yang Memiliki Sertifikat Kompetensi	6,21 %	8,87 %
8.2	Rasio Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100 %	100 %

#### B. Realisasi Belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Realisasi belanja Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 227.311.510.278 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
3. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
4. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
5. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
6. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
7. Program Penataan Bangunan dan Gedung;
8. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
9. Program Penyelenggaraan Jalan;
10. Program Pengembangan Jasa Konstruksi; dan
11. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang.

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurang maksimalnya SDM pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang seperti jabatan struktural dan jabatan teknis sehingga memperlambat kinerja perangkat daerah serta kurangnya SDM pelaksana yang sesuai dengan kompetensi;
2. Penyelenggaraan SPM yang belum sesuai target;
3. Perubahan/pembaruan sistem dan pemberlakuan peraturan yang masih belum dipahami oleh SDM di SKPD;
4. Masih banyak sarana dan prasarana yang telah terbangun namun mengalami kerusakan sehingga masyarakat yang telah memiliki akses terhadap standar pelayanan minimal menjadi tidak mendapat akses kembali;
5. Masih terdapat daerah-daerah yang masyarakatnya enggan menggunakan akses yang diberikan karena sudah terbiasa menggunakan akses yang tidak memenuhi standar pelayanan minimal;
6. Masih adanya kendala/tidak tersedianya lokasi untuk pembangunan sarana pemenuhan standar pelayanan minimal sehingga pemenuhan akses belum dapat terlaksana;
7. Ketersediaan tanah sebagai sarana untuk melakukan pembangunan fasilitas air minum dan sanitasi yang masih terkendala/tidak tersedia;
8. Kurangnya jumlah Personil dalam pelaksanaan kegiatan penunjang SPM sehingga pelaksanaan belum optimal;
9. Kurangnya anggaran yang dapat memenuhi pelaksanaan SPM secara optimal dan menyeluruh;
10. Belum memadainya kapasitas layanan air minum oleh PDAM untuk pelanggan;
11. Kurangnya minat masyarakat untuk menggunakan layanan air minum oleh PDAM karena masih tingginya tarif air minum dari PDAM; dan
12. Belum beroperasionalnya IPLT sehingga belum bisa menyediakan Layanan Lumpur Tinja Terjadwal (LLTT) dan melaksanakan penyedotan lumpur tinja.

#### 4. Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

##### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan Kawasan Permukiman yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	0 %	0 %
2	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni Bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	0 %	0 %
3	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh Di Bawah 10 Ha di Kabupaten/Kota yang ditangani	0 %	0,12 %
4	Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	7 %	7,41 %
5	Jumlah Perumahan yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	0,27 %	4,02 %

##### B. Realisasi Belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Realisasi belanja Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 11.169.942.567 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pengembangan Perumahan;
3. Program Kawasan Pemukiman;
4. Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kumuh; dan
5. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).

##### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Belum tersedianya data korban bencana sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Tahun 2024 telah didata 171 rumah rawan bencana atau relokasi program pemerintah mencakup sepanjang aliran sungai Negara yaitu Kelurahan Kebun Sari, Desa Palampitan Hulu dan Desa Palampitan Hilir. Sedangkan pada tahun 2023 telah didata 141 rumah rawan bencana atau relokasi program pemerintah mencakup sepanjang aliran sungai Negara yaitu yaitu Desa Tangga Ulin Hulu, Desa Tangga Ulin Hilir, Desa Pamintangan, Palampitan Hulu, Desa Palampitan Hilir, Kelurahan Paliwara dan Kelurahan Kebun Sari;
2. Bencana yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah banjir yang melanda setiap tahunnya karena merupakan daerah daratan rendah yang dilewati sungai Balangan dan Tabalong meskipun dampak yang diakibatkan hanya berupa genangan. Dari kejadian tersebut menjadi alasan sehingga bencana tersebut tidak termasuk dalam bencana sesuai dengan aturan yang berlaku untuk standar pelayanan minimal;
3. Sumber Daya Manusia yang belum memadai dalam mendukung pelaksanaan standar pelayanan minimal;
4. Ketersediaan anggaran APBD masih terbatas untuk kegiatan rutinitas OPD; dan
5. Masih lemahnya fungsi koordinasi antara stakeholder dalam pelaksanaan pencapaian SPM.

## 5. Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

### A. Capaian Kinerja *Outcome*

Capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1.1	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	90,57 %	100 %
1.2	Jumlah Perda dan Perkada yang Ditegakkan	100 %	10 buah
2.1	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Informasi Rawan Bencana	8.399 Orang	6.350 Orang

2.2	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	8.399 Orang	540 Orang
2.3	Jumlah Warga Negara yang Memperoleh Layanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	17.295 Orang	26 Orang
3.1	Persentase Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	100 %	100 %
3.2	Waktu Tanggap (Respon Time) Penanganan Kebakaran	10,69 menit	15 menit

#### B. Realisasi Belanja Urusan Trantibum Linmas

Realisasi belanja Urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Hulu Sungai Tahun 2024 sebesar Rp. 14.528.605.790 dengan rincian Rp. 8.892.363.686 pada **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran** dan Rp. 5.636.242.104 pada **Badan Penanggulangan Bencana Daerah**, dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum; dan
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran.
4. Program Penanggulangan Bencana

#### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Trantibum Linmas di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan
  - a. Belum adanya pelatihan teknis penerapan SPM Trantibumlinmas dan Damkar khususnya integrasi pemenuhan SPM dalam dokumen perencanaan dan penganggaran; dan
  - b. Masih terdapatnya SPM Trantibumlinmas dan Damkar yang belum terakomodir dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
2. Koordinasi
  - a. Belum maksimalnya pendataan dan verifikasi faktual terhadap warga yang berpotensi terkena dampak kerugian akibat penegakan perda dan perkara.
3. Pendanaan

- a. Pemenuhan SPM khususnya penyediaan anggaran guna antisipasi potensi kerugian materiil dan pengobatan bagi warga Negara yang terkena dampak akibat penegakan perda dan perkada belum maksimal; dan
  - b. Kurangnya anggaran dana yang tersedia guna pemenuhan SPM Trantibumlinmas dan Damkar.
4. Lain-lainnya
- a. Kurangnya SDM dalam pemenuhan SPM bidang Trantibumlinmas dan Damkar.

## 6. Urusan Sosial

### A. Capaian Kinerja Outcome

Capaian kinerja urusan sosial yang diperoleh oleh Kabupaten Hulu Sungai Utara pada tahun 2024 berdasarkan Indikator Kinerja Kunci yang digunakan adalah sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kunci	Capaian Kinerja Tahun 2023	Capaian Kinerja Tahun 2024
1	Tingkat Persentase Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis yang Terpenuhi Kebutuhannya di Luar Panti	31,92 %	90,55 %
2	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota	100 %	0 %

### B. Realisasi Belanja Urusan Sosial

Realisasi belanja Urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 sebesar Rp. 9.017.706.732 dengan program/kegiatan unggulan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
2. Program Pemberdayaan Sosial;
3. Program Rehabilitasi Sosial;
4. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
5. Program Penanganan Bencana; dan
6. Program Pengelolaan Taman Makan Pahlawan.

### C. Permasalahan Yang Dihadapi

Beberapa permasalahan yang dihadapi untuk urusan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM berkualitas karena keterbatasan tenaga kerja sosial yang kompeten dan terlatih di tingkat daerah, baik dalam kuantitas maupun kualitas;
2. Koordinasi antar instansi yang lemah karena kurangnya sinergi antara pemerintah daerah, instansi terkait, dan lembaga sosial dalam pelaksanaan SPM;
3. Ketidaksesuaian data dan informasi karena data yang tidak akurat atau kurang terkini mengenai kelompok sasaran seperti anak terlantar, lansia terlantar, dan penyandang disabilitas menyebabkan ketidaktepatan dalam perencanaan;
4. Kurangnya partisipasi masyarakat karena rendahnya kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam mendukung program sosial untuk mencapai target SPM;
5. Kendala geografis dikarenakan wilayah yang terpencil dan sulit dijangkau membuat akses pelayanan sosial menjadi terbatas; dan
6. Perubahan regulasi yang cepat sering membuat pelaksanaan SPM menjadi tidak konsisten.

### **3. HASIL EPPD DAN OPINI ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA**

#### **1. Hasil EPPD Tahun 2021**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.3-1109 Provinsi dan Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 1,30 dan status kinerja *Sangat Rendah*; dan

#### **2. Hasil EPPD Tahun 2022**

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Provinsi dan Kabupaten/Kota berhasil mendapatkan hasil EPPD dengan skor kinerja 3.0138 dan status kinerja *Sedang*.

3. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2014 Berdasarkan Laporan Nomor 11.A/LHP/XIX.BJM/05/2015 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini *Wajar Dengan Pengecualian (WDP)* Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

4. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2015 Berdasarkan Laporan Nomor 11.A/LHP/XIX.BJM/06/2016 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini *Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)* Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

5. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2016 Berdasarkan Laporan Nomor 07.A/LHP/XIX.BJM/05/2017 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil

- mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
6. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2017 Berdasarkan Laporan Nomor 06.A/LHP/XIX.BJM/05/2018 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  7. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2018 Berdasarkan Laporan Nomor 06.A/LHP/XIX.BJM/05/2019 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  8. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2019 Berdasarkan Laporan Nomor 11.A/LHP/XIX.BJM/06/2020 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  9. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2020 Berdasarkan Laporan Nomor 7.A/LHP/XIX.BJM/05/2021 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  10. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 Berdasarkan Laporan Nomor 8.A/LHP/XIX.BJM/05/2022 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
  11. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2022 Berdasarkan Laporan Nomor 7.A/LHP/XIX.BJM/05/2023 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
  12. Opini Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Berdasarkan Laporan Nomor 9.A/LHP/XIX.BJM/04/2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

#### 4. RINGKASAN REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Audited/Unaudited) Tahun 2024 Realisasi Pendapatan Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mencapai sebesar Rp. 1.824.754.892,62 dan Realisasi Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 mencapai Rp. 1.529.454.753.214,00

Secara rinci, rincian realisasi anggaran pendapatan dan belanja Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2024 berdasarkan jenis pendapatan dan jenis belanja dapat dilihat dalam tabel berikut :

Kode Rekening	Jenis Pendapatan	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>4</b>	<b>Pendapatan Daerah</b>	<b>1.602.241.302.841,00</b>	<b>1.824.754.822.892,62</b>	<b>112,47</b>
<b>4.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah (PAD)</b>	<b>151.552.203.799,00</b>	<b>153.645.369.639,62</b>	<b>101,38</b>
4.1.01	Pajak Daerah	14.688.000.000,00	14.345.904.294,00	97,67
4.1.02	Retribusi Daerah	6.229.875.500,00	6.039.814.975,00	96,95
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	11.502.427.299,00	11.502.427.299,00	100,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	119.131.901.000,00	121.770.750.091,62	102,22
<b>4.2</b>	<b>Pendapatan Tranfer</b>	<b>1.450.239.099.042,00</b>	<b>1.670.488.447.621,00</b>	<b>115,59</b>
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.341.679.501.797,00	1.550.811.928.279,00	115,29
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	108.559.597.245,00	119.676.519.342,00	110,24
<b>4.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah</b>	<b>450.000.000,00</b>	<b>607.478.612,00</b>	<b>135,00</b>
4.3.01	Pendapatan Hibah	0,00	20.500.000,00	0,00
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	450.000.000,00	586.978.612,00	130,44
Kode Rekening	Jenis Belanja	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
<b>5</b>	<b>Belanja Daerah</b>	<b>1.743.733.685.992,00</b>	<b>1.529.454.753.214,00</b>	<b>87,71</b>
<b>5.1</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>1.142.989.657.487,00</b>	<b>981.450.856.384,00</b>	<b>85,87</b>
5.1.01	Belanja Pegawai	602.615.173.318,00	522.147.285.091,00	86,65

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	473.744.028.407,00	394.161.048.033,00	83,20
5.1.03	Belanja Bunga	3.759.667.603,00	3.759.667.603,00	100,00
5.1.05	Belanja Hibah	55.117.388.159,00	54.334.295.657,00	98,58
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	7.753.400.000,00	7.048.560.000,00	90,91
<b>5.2</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>335.329.547.386,00</b>	<b>286.894.600.370,00</b>	<b>85,56</b>
5.2.01	Belanja Modal Tanah	800.000.000,00	0,00	0,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	81.395.414.496,00	76.952.272.788,00	94,54
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	93.570.620.256,00	69.238.433.506,00	74,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	157.893.857.034,00	142.022.430.936,00	89,95
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.411.155.600,00	1.402.145.000,00	99,36
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	258.500.000,00	253.700.000,00	98,14
<b>5.3</b>	<b>Belanja Tidak Terduga</b>	<b>7.653.066.519,00</b>	<b>373.500.000,00</b>	<b>4,88</b>
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	7.653.066.519,00	373.500.000,00	4,88
<b>5.4</b>	<b>Belanja Transfer</b>	<b>257.761.414.600,00</b>	<b>257.761.414.600,00</b>	<b>100,00</b>
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	2.125.000.000,00	2.125.000.000,00	100,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	255.636.414.600,00	255.636.414.600,00	100,00
	<b>SURPLUS / DEFISIT</b>	<b>(141.492.383.151,00)</b>	<b>295.300.069.678,62</b>	<b>(208,70)</b>
<b>6</b>	<b>Pembiayaan Daerah</b>	<b>141.492.383.151,00</b>	<b>141.489.383.151,30</b>	<b>100,00</b>
<b>6.1</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan</b>	<b>255.697.804.806,00</b>	<b>255.697.804.806,30</b>	<b>100,00</b>
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	255.694.804.806,00	255.694.804.806,30	100,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00

6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	3.000.000,00	0,00	0,00
<b>6.2</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan</b>	<b>114.205.421.655,00</b>	<b>114.205.421.655,00</b>	<b>100,00</b>
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	20.500.055.526,00	20.500.055.526,00	100,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	93.705.366.129,00	93.705.366.129,00	100,00
	<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>141.492.383.151,00</b>	<b>141.489.383.151,30</b>	<b>100,00</b>
	<b>Sisa Lebih / Kurang Pembiayaan Anggaran</b>	<b>0,00</b>	<b>436.789.452.829,92</b>	<b>0,00</b>

## 5. INOVASI DAERAH

Berdasarkan Database Inovasi Daerah Tahun 2024 Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki inovasi daerah sebagai berikut :

No	Pelaksana Inovasi Daerah	Inovasi Daerah	Keterangan
1	Dinas Kesehatan	SIPESAT (Sistem Informasi Pemeriksaan Diagnosis Dan Resistensi Obat TB)	Sebagai aplikasi yang memfasilitasi petugas kesehatan dan masyarakat guna mendapatkan hasil pemeriksaan Tes Cepat Molekuler lebih cepat, tepat dan mudah.
2	Bapenda	Kwitansi Online (Pelayanan Kesehatan) Pada Aplikasi Simpatda	Memberikan manfaat berupa peningkatan pencapaian target pajak dan perbaikan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien, cepat dan praktis, sehingga diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik bebas dari KKN (Good Governance)
3	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	LIMPING (Layanan Inovasi Mudah Pembuatan KIA Keliling)	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan khususnya KIA (Kartu Identitas Anak) di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
4	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	SIPP HSU (Sistem Informasi Presensi Pegawai Hulu Sungai Utara)	Meningkatkan disiplin pegawai dan rekap kehadiran pegawai digunakan sebagai indikator penilaian disiplin pegawai dalam pemberian TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).
5	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	JEMPOL MANIS (Jemput Bola Perekaman Data Bagi Siswa)	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan khususnya perekaman KTP-el di

			Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6	Bapenda	Pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Secara Online	Mempermudah wajib pajak, wajib retribusi serta Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam hubungannya dengan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) sebagai alat atau media penyimpan data, pengolah data dan penyajian data wajib retribusi daerah secara online yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pemerintah daerah.
7	Bapedalitbang	SIMONEV (Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi)	Mempermudah Evaluasi RKPD yang akan menjadi masukan untuk penyusunan RKPD tahun berikutnya dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
8	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	JARTAPLOK HSU (Jaringan Tetap Lokal Hulu Sungai Utara)	Interkoneksi antar SKPD yang berada ada pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupten Hulu Sungai Utara untuk memudahkan koordinasi antar SKPD baik secara
9	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	PALUNG HATI (Pelayanan Langsung Akta Kelahiran dan Akta Kematian)	Mengoptimalkan kualitas pelayanan publik melalui peningkatan jumlah kepemilikan dokumen kependudukan khususnya Akta Kematian di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
10	Bapenda	Pendaftaran Wajib Pajak dan Retribusi Online melalui SIMPATDA (Sistem Informasi Manajemen Pendapatan Daerah)	Bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara akan memberikan manfaat berupa peningkatan pencapaian target pajak dan perbaikan sistem pelayanan publik yang efektif dan efisien, cepat dan praktis, sehingga diharapkan akan menciptakan pemerintahan yang baik bebas dari KKN (Good Governance)
11	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	"BAMIMPI" (Bagarak Manunti Rumah Pamulihan Gizi)	Untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Ibu Balita. Memberikan informasi tentang prinsip dasar PMT
12	Dinas Pertanian	SI PEKING - Sistem Pelayanan Kesehatan Hewan Keliling	Tersedianya data cakupan pelayanan Keswan dan data penyakit hewan yang lebih akurat
13	Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	PORTAL HSU (Satu Akun Untuk Semua Layanan - Single Sign On)	Mewujudkan Integrasi, sinkronisasi dan sinergi penyelenggaraan E-Government menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan benar berbasis Teknologi Informasi Komunikasi. Mengoptimalkan pelayan publik dan non publik Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran,

			pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
14	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Implementasi Pengarusutamaan Gender melalui Sistem Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (SIPRIMA SAKTI)	Para perencana kebijakan, program dan kegiatan dapat mewujudkan anggaran yang responsif gender, serta untuk Mewujudkan Percepatan PUG di Daerah yang ber Keadilan Kesetaraan Gender, mendapatkan Hak dan Kesempatan yang sama dalam menikmati Pembangunan baik Laki-laki maupun Perempuan
15	Dinas Kesehatan	Sistem Informasi Stok Obat (SI SOBAT)	Apoteker lebih mudah dalam melaksanakan tugasnya dalam mengelola sediaan obat/perbekalan farmasi, termasuk pencatatan dan pelaporan obat. Akan lebih mudah dan cepat mengetahui stok awal, barang masuk, barang keluar, dan stok akhir obat yang ada di apotek. Tidak perlu waktu lama melakukan pengecekan stok obat/ perbekalan farmasi.
16	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	SINERGI (Strategi Peningkatan Jumlah Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Dasar Melalui Ekstrakurikuler Religi)	Meningkatkan Generasi yang Agamis dan Berakhlak Mulia dalam Pengetahuan Keterampilan dan Pengembangan Karakter.
17	Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	GENTONG MAS SANTUN (Gerakan Tolong Masyarakat Sanitasi Tuntas)	Sistem pengolahan limbah yang terpadu dan ramah lingkungan diterapkan di lahan basah dan memudahkan masyarakat daerah rawa/sungai yang kesulitan membuat septiktank daerah rawa/sungai

Amuntai, Maret 2025

